

GAYA PENULISAN
PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
STUDI EMPIRIS PADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

NAMA : ZULFIKRI
NIM : 126232174

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

GAYA PENULISAN

PARAGRAF PENEKANA SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

STUDI EMPIRIS PADA

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ZULFIKRI

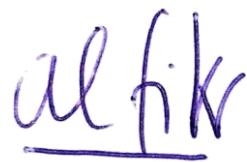
NIM : 126232174

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

GAYA PENULISAN
PARAGRAF PENEKANA SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
STUDI EMPIRIS PADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Laporan\Tugas Akhir

Disusun Oleh:


ZULFIKRI

NIM 126232174

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



SUSANTO SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana gaya penulisan yang diterapkan dalam paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini menggunakan sampel LHP BPK yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Data sampel diperoleh melalui permintaan dokumen melalui Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan rumus perhitungan jumlah karakter (*length*) pada aplikasi Microsoft Excel dan *Gunning Fog Index*, yaitu *Flesch Reading Ease Test (Readability)*. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat penyajian informasi oleh Pemeriksa khususnya paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI yang menggunakan kalimat panjang dan tingkat keterbacaan dengan level rendah (*college graduate level*). Namun tentu saja terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dimana gaya penulisan Pemeriksa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini.

Kata Kunci: Penekanan Suatu Hal; Paragraf Hal Lain, LHP; BPK RI

KATA PENGANTAR

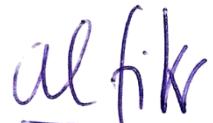
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya yang, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam menyusun tugas akhir ini, Penulis telah banyak mendapat masukan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis, dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa terbaiknya sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Isteri tersayang uang dengan sigap dan penuh semangan memberikan dukungan, bantuan dan cinta bagi Penulis;
3. Anak-anak tersayang yang selalu menemani Penulis, baik ketika proses perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir ini;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara periode 2024-2028;
5. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Susanto, S.E. , M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, dan meluangkan waktunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Ibu Herlin Tundjung Setijaningsih, Dr. S.E., Ak., M.Si, CA yang telah tanpa lelah memberikan arahan dan menjadi pengingat bagi kami dalam menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian pendidikan profesi ini;
9. Teman-teman dan sahabat sekelas yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dunia akademis. Penulis memohon dibukakan pintu maaf apabila selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Medan, 22 Desember 2024


Zulfikri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Signifikansi Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
A. LHP BPK RI	4
B. Penulisan Paragraf PSH dan PHL dalam LHP.....	5
C. Penerapan PSH dan PHL di BPK RI.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	8
A. Metode Penelitian.....	8
B. Populasi dan Sampel	8
C. Analisis Data Penelitian	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
A. Panjang Tulisan.....	12
B. Keterbacaan (<i>Readability</i>).....	13
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran.....	15
REFERENSI	16

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Jumlah Sampel serta Distribusi Penyajian PSH dan PHL di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.1 : Rekapitulasi Hasil Pengoahan Data Panjang Kalimat PSH dan PHL di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.2 : Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data Paragraf PSH untuk Perhitungan Flesch Reading Ease Test
- Tabel 4.3 : Rekapitulasi Hasil Pengoahan Data Paragraf PHL untuk Perhitungan Flesch Reading Ease Test

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Rumus Perhitungan *Flesch Reading Ease Test*
Gambar 3.2 : Rumus Perhitungan *Flesch-Kincaid Grade Level Test*
Gambar 3.3 : Interpretasi Hasil Perhitungan Flesch Reading Ease Test

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor (UU) 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Hasil pemeriksaan LKPD dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai *output* dari proses pemeriksaan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

LHP merupakan dokumen resmi yang berfungsi untuk:

1. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;
3. membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan
4. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Salah satu elemen penting dan terbaru dalam LHP BPK adalah penulisan paragraf yang menekankan suatu hal (penekanan suatu hal/PSH) dan paragraf yang menyoroti hal lain (paragraf hal lain/PHL). Paragraf PSH dan PHL merupakan bentuk komunikasi tambahan dari pemeriksa BPK yang disajikan dalam LHP dan ditempatkan setelah pernyataan opini BPK atas laporan keuangan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penerapan penyajian paragraf PSH dan PHL ini merupakan adaptasi yang dilakukan BPK atas pemberlakuan ISSAI 1706 dan SA 706. SA 706 ini mengatur tentang komunikasi tambahan dalam LHP ketika Pemeriksa menganggap perlu untuk:

1. menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang sedemikian penting bahwa hal atau hal-hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan; atau

2. menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas pemeriksaan, tanggung jawab Pemeriksa, atau LHP.

(Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2021)

Berdasarkan Penjelasan Umum SPKN, BPK harus membuat laporan pemeriksaan yang profesional, dimana untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan gaya penulisan dan bahasa laporan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Gaya penulisan dalam LHP ini memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, sesuai dengan karakteristik LHP yang dinyatakan dalam SPKN.

LHP yang jelas diartikan sebagai laporan yang mudah dibaca dan dipahami, ditulis dengan bahasa yang tidak menimbulkan ambigu dan interpretasi, sederhana, dan sedapat mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis. Sedangkan, LHP yang ringkas dimaknai dengan penyajian informasi dalam LHP yang menghindari penyajian informasi yang tidak berlebihan, tidak perlu, dan tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017)

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu bagaimana gaya penulisan yang diterapkan dalam paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. BPK telah mengatur penerapan penulisan paragraf PSH dan PHL berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan LKPD pada tanggal 9 Mei 2016 dan dimutakhirkan dengan diterbitkannya Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPD pada tanggal 5 Januari 2021.

Sejak penerapan penulisan paragraf PSH dan PHL ini, penelitian yang dilakukan terkait dengan penulisan paragraf PSH dan PHL di BPK belum pernah dilakukan, khususnya terkait dengan gaya penulisan dalam penyajian paragraf PSH dan PHL.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya penulisan pada paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI, khususnya LHP yang diterbitkan oleh Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

D. Signifikansi Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada akademik terkait analisis linguistik/gaya penulisan dalam LHP, serta memperkaya pemahaman tentang peranan gaya penulisan dalam komunikasi pemeriksaan, khususnya hasil pemeriksaan BPK.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi Pemeriksa dan penulis LHP tentang pentingnya pemilihan gaya penulisan yang efektif untuk menyampaikan temuan pemeriksaan secara jelas dan ringkas. Dalam konteks pengambilan kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, termasuk pengambil kebijakan/penyusun panduan di lingkungan internal BPK RI, untuk meningkatkan kualitas penulisan LHP serta memastikan temuan pemeriksaan lebih mudah dipahami dan direspon dengan tepat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan memahami dan mengaplikasikan gaya penulisan yang tepat, LHP BPK RI diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam penyampaian informasi dan pesan serta mencapai tujuan penulisan paragraf PSH dan PHL, yaitu untuk menarik perhatian pengguna laporan atas hal penting/penekanan yang disajikan dalam LHP.

REFERENSI

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., & Wallage, P. (2014). *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. Pearson Education.
5. Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik: SA 706 (Revisi 2021)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
6. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2015). *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements*.
7. International Standards on Auditing (ISA) 706. (2020). *Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report*. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
8. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). (2016). *Guidelines on Audit of Financial Statements*. INTOSAI.
9. Küster, S. (2024). *The determinants of linguistic features in key audit matters: Empirical evidence from Europe*. WILEY, 582–614.